

Peran Tokoh Adat dalam Keputusan Kesehatan tentang Program KB di Desa Kenyabur Baru, Kabupaten Sintang (Perspektif Fungsionalisme Struktural)

Barliy Brasila¹, Rizki Amartani², Yolanda Montessori³, Lea Masan⁴, Akhmad Hasan⁵,
Silvia Finida Hannisa⁶
^{1,2,3,4,5,6} Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya, e-mail: barliybrasila09@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
13-05-2026

Direvisi:
03-06-2026

Diterima:
06-06-2026

Keywords

: Traditional Leaders, Family Planning Program, Structural Functionalism

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of traditional leaders in health decision-making regarding the Family Planning (KB) program in Kenyabur Baru Village, Sintang Regency, through the perspective of structural functionalism. Using a qualitative method with a descriptive approach, data were collected through in-depth interviews with Dayak and Javanese traditional leaders, village government officials, health workers, and the local community. The results indicate that the success of the KB program in this region is driven by the fulfillment of four functional prerequisites in the AGIL scheme (Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency). Traditional leaders play a central role in the integration function by aligning government policies with traditional values, ensuring that the KB program is accepted as part of moral responsibility and orderly living rather than structural coercion. The tripartite synergy between traditional authorities, the village government, and health workers creates an equilibrium that minimizes social resistance and strengthens cultural legitimacy toward modern healthcare service.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tokoh adat dalam pengambilan keputusan kesehatan terkait program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kenyabur Baru, Kabupaten Sintang, melalui perspektif fungsionalisme struktural. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat Dayak dan Jawa, aparat pemerintah desa, tenaga kesehatan, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program KB di wilayah ini didorong oleh terpenuhinya empat prasyarat fungsional dalam skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency). Tokoh adat memainkan peran sentral dalam fungsi integrasi dengan menyelaraskan kebijakan pemerintah dan nilai-nilai tradisional, sehingga program KB diterima sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keteraturan hidup, bukan sebagai paksaan struktural. Sinergi tripartit antara otoritas adat, pemerintah desa, dan tenaga kesehatan menciptakan keseimbangan (equilibrium) yang meminimalkan resistensi sosial dan memperkuat legitimasi kultural terhadap layanan kesehatan modern.

Kata Kunci

: Tokoh Adat, Program KB, Fungsionalisme Struktural

Corresponding Author

: Barliy Brasila, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 80, Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: barliybrasila09@gmail.com

PENDAHULUAN

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu instrumen kebijakan kesehatan nasional yang bertujuan mengatur kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, serta memperkuat ketahanan keluarga. Program KB telah dijalankan lebih dari 50 tahun sebagai program pemerintah yang berupaya mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan membatasi angka kelahiran dan mengatur jarak kelahiran. Secara nasional, pengguna KB di beberapa wilayah sudah mencapai lebih dari 50 persen, bahkan di Kalimantan Barat capaian pengguna KB tahun 2023 mencapai 60%, melampaui rata-rata nasional. Pada level tingkat lokal, capaian program ini menghadapi variasi. Desa Kenyabur Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang dengan jumlah penduduk 1.607 jiwa, 464 KK, dan terbagi dalam 5 dusun, menunjukkan dinamika yang menarik. Berdasarkan data dari Puskesmas Tempunak, terjadi penurunan penggunaan KB dalam tiga bulan terakhir tahun 2024, misalnya jumlah akseptor aktif atau baru dan lama menurun dari total 11 menjadi 4.

Hasil survei mawas diri yang dilakukan oleh mahasiswa STIKARA Sintang pada pelaksanaan pengabdian Masyarakat Januari 2025 menunjukkan bahwa meskipun 70% penduduk pernah menggunakan KB, masih terdapat sekitar 30% masyarakat yang tidak menggunakan program KB, seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Survei Mawas Diri di Desa Kenyabur Baru Tanggal 12-14 Januari 2025

Fenomena ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program KB tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan kesehatan dan alat kontrasepsi, tetapi sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya masyarakat setempat. Peran tokoh adat menjadi titik temu penting antara struktur formal (pemerintah/tenaga medis) dengan struktur kultural (adat), yang menentukan penerimaan atau resistensi masyarakat terhadap program KB.

Di Desa Kenyabur Baru, otoritas tokoh adat berperan besar sebagai penjaga nilai, norma, serta mediator sosial. Keputusan rumah tangga mengenai kontrasepsi, jarak kelahiran, hingga jumlah anak sering kali dipengaruhi oleh komunikasi adat, nasihat kolektif, dan restu tokoh adat. Perspektif fungsionalisme struktural menjadi relevan dalam menganalisis fenomena ini, karena keputusan kesehatan dipahami bukan sekadar pilihan rasional individu, melainkan hasil internalisasi pola budaya yang stabil, aturan adat, serta legitimasi simbolik yang diberikan oleh tokoh adat (Nasrudin & Nursari, 2025). Tokoh adat berfungsi sebagai pelantara, menafsirkan tradisi, memberikan sanksi sosial, serta menormalisasi praktik baru seperti program KB agar sesuai dengan norma lokal (Zubaidi, 2025).

Di sisi lain, secara regulasi program KB memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan pentingnya perencanaan kependudukan, pembangunan keluarga, serta

pelaksanaan KB. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menekankan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 mengatur perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, KB, serta sistem informasi keluarga sebagai landasan operasional. Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 menetapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang mengelola program KB secara nasional. Dengan kondisi sosial pedesaan yang ditopang jejaring kekerabatan dan modal sosial berbasis kepercayaan, legitimasi kebijakan kesehatan sering diperoleh melalui pengesahan simbolik misalnya restu tokoh adat atau penyisipan pesan KB dalam forum adat.

Kajian terdahulu yang bersentuhan dengan topik kajian ini sudah banyak dilakukan. Samsul Bahri (2016) menyimpulkan bahwa ketahanan sistem pendidikan pesantren ditentukan oleh keberhasilan menjalankan empat fungsi struktural-fungsional, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola nilai, yang didukung oleh kepemimpinan kiai dalam proses pendidikan (Bahri, 2016). Yevi Sopiah menyatakan bahwa teori struktural fungsionalisme dan analisis gender memiliki perbedaan perspektif, namun keduanya menunjukkan bahwa perubahan peran gender dalam keluarga kontemporer memerlukan adaptasi struktur keluarga agar fungsi sosial tetap berjalan sekaligus mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender (Sopiah, 2025). Penelitian Marwono dkk menemukan bahwa keterlibatan aktif pemimpin adat sebagai fasilitator, penyampai pesan, dan penjaga nilai budaya meningkatkan efektivitas promosi kesehatan masyarakat di daerah terpencil, sehingga integrasi peran mereka dalam strategi kesehatan menjadi pendekatan yang efektif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Marwono et al., 2025). Hilal dkk mengungkap bahwa kearifan lokal berperan penting dalam pencegahan penyakit menular melalui pembentukan perilaku hidup sehat, pemanfaatan pengetahuan tradisional, dan kontrol sosial oleh kepemimpinan adat, sehingga integrasinya dengan program kesehatan modern dapat memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan (Hilal et al., 2026). Namun demikian, kajian mengenai peran tokoh adat dalam pengambilan keputusan keikutsertaan Program KB Perspektif Fungsionalisme Struktural belum dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tokoh adat dalam pengambilan keputusan kesehatan masyarakat terkait Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kenyabur Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, melalui perspektif strukturalisme sosiologi. Penelitian ini menjawab pertanyaan pokok: Apa peran tokoh adat dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat tentang ikut atau tidaknya dalam program Keluarga Berencana (KB) dan bagaimana kerja sama antara tokoh adat dengan tenaga kesehatan dan pemerintahan desa dalam menyampaikan program KB kepada Masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan BKKBN untuk menyusun strategi program KB yang selaras dengan nilai dan norma lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam peran tokoh adat dalam memengaruhi keputusan kesehatan masyarakat terkait keikutsertaan dalam Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kenyabur Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena memiliki karakteristik masyarakat multietnis yang masih mempertahankan nilai-nilai adat dalam kehidupan sosial, sekaligus menjadi sasaran pelaksanaan program KB pemerintah. Informan penelitian ditentukan secara purposive, meliputi tokoh adat Dayak dan Jawa, kepala desa, tenaga kesehatan, kepala keluarga, serta

masyarakat peserta program KB yang dianggap memiliki informasi relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap data kependudukan serta pelaksanaan program KB di desa. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan validitas temuan, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari tokoh adat, pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons, khususnya skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*), guna menjelaskan fungsi tokoh adat dalam menjaga keseimbangan sosial dan mendukung penerimaan program KB di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori Fungsionalisme Struktural atau sering disebut Struktural Fungsional (Nugroho, 2021) lahir dari pengaruh teori sistem umum. Menurut pendapat Emile Durkheim adalah pelopor terpenting dalam pengembangan teori struktur fungsional ini. Akar pertimbangannya pada teori ini, bagaimanapun, berasal dari Auguste Comte dan Herbert Spencer. Auguste Comte pertama kali memulai dengan refleksinya tentang analogi organisme. Pemikiran Comte ini kemudian dikembangkan oleh Herbert Spencer. Spencer membuat perbandingan untuk menemukan kesamaan antara masyarakat dan organisme. Dari pengamatan ini, Spencer mengembangkan gagasan fungsionalisme yang diperlukan, yang kemudian menjadi panduan Spencer untuk analisis substantif dan kekuatan pendorong di balik analisis fungsional

Selain itu, teori Fungsionalisme Struktural dipengaruhi ilmu alam, khususnya biologi, yang menekankan cara suatu sistem diatur dan dipertahankan. Sementara itu, unsur strukturalisme yang datang dari linguistik menyoroiti bagaimana bahasa dan sistem sosial diorganisasikan. Kemudian teori fungsional structural juga diperkenalkan oleh Talcott Parsons sebagai kelompok teori modern. Dasar dan gagasan utama ialah realitas sosial sebagai hubungan sistem masyarakat, yang berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung, sehingga perubahan satu bagian dipandang menyebabkan perubahan lain dari sistem Teori fungsionalisme structural (Aprilia, 2022).

Pada dasarnya, teori Fungsionalisme Struktural berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dalam kenyataan. Teori memiliki dua peran utama. *Pertama*, membantu menjelaskan fakta-fakta yang sudah diketahui. *Kedua*, membuka peluang munculnya sudut pandang baru yang dapat mengungkap fakta-fakta lain yang sebelumnya belum terlihat. Dengan kata lain, ketika suatu kejadian ditafsirkan menggunakan kerangka teori yang berbeda, maka hasil penafsiran itu juga dapat menghasilkan jenis fakta yang berbeda pula (Sigai, 2018). Kemudian menurut (Sigai, 2018) menegaskan bahwa teori fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem, secara fungsional berada dalam kondisi ekuilibrium dikenal dengan *integration approach, order approach, equilibrium*, atau lebih populer dengan sebutan *stuructural-functional approach*.

Menurut (Harisan, 2022) pada dasarnya, analisis struktural fungsional berpusat pada dua konsep utama, yaitu fungsi dan struktur. Prinsip-prinsip dasarnya antara lain:

1. Masyarakat adalah sistem yang rumit, terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung dan saling bergantung. Setiap bagian memengaruhi bagian lain.
2. Setiap bagian masyarakat ada karena memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas masyarakat.
3. Masyarakat memiliki mekanisme untuk menyatukan diri, misalnya lewat kepercayaan dan

nilai yang dipegang bersama.

4. Masyarakat cenderung bergerak menuju keadaan seimbang. Jika ada gangguan di satu bagian, bagian lain akan menyesuaikan agar harmoni tetap terjaga
5. Perubahan sosial memang jarang terjadi, tetapi jika itu muncul, biasanya akan membawa dampak yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Lebih lanjut (Nugroho, 2021) menyatakan bahwa pada teori struktural fungsional ada empat komponen penting yaitu *Adaptation*, *Goal Atainment*, *Integration*, dan *Latency* atau singkat dengan AGIL adapun penjelasan sebagai berikut :

1. *Adaptation*: sistem sosial atau masyarakat selalu mengalami perubahan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, secara internal maupun eksternal.
2. *Goal Attainment*: setiap sistem sosial atau masyarakat akan senantiasa terdapat berbagai tujuan yang hendak dicapai sistem sosial tersebut.
3. *Integration*: setiap bagian dari sistem sosial terintegrasi satu sama lain serta cenderung bertahan pada equilibrium (keseimbangan).
4. *Latency*: sistem sosial senantiasa berusaha mempertahankan bentuk-bentuk interaksi yang relatif tetap atau statis, sehingga setiap perilaku yang menyimpang diakomodasi melalui kesepakatan-kesepakatan yang terus menerus diperbaharui

Adapun penjelasan lebih tegas menurut (Fadri, 2020) konsep AGIL terdiri, (1) *Adaptation*, menunjukkan sistem sosial pada keharusan terhadap penyesuaian lingkungan dan masyarakat terhadap perilaku individu yang menuntut pada suatu bentuk susunan dan penyesuaian terhadap tuntutan dan kenyataan yang sedang dihadapi. (2) *Goal attainment*, persyaratan fungsional yang menggiring pada pernyataan dan sikap atas tujuan-tujuan bersama dalam suatu sistem sosial. Tujuan sistem sosial memusatkan tindakan pada kegiatan penyesuaian persiapan dalam mencapai tujuan tertentu. (3) *Integration*, pernyataan hubungan interelasi yang menghubungkan anggota dalam bentuk sistem sosial. Hubungan sistem sosial dan interelasi mengacu pada terciptanya hubungan emosional solidaritas dan bekerjasama sebagai bentuk dari tujuan perkembangan relasi kolektif. (4) *Laten pattern maintenance*, konsep latensi yang menunjukkan berhentinya interaksi dikarenakan kejenuhan dan kelelahan yang tergambar dari anggota kelompok terhadap sistem sosial dan keterlibatannya dalam sistem tersebut.

Konsep AGIL menjelaskan adanya hierarki pada tataran perubahan sosial yang menggambarkan susunan dan tahapan terjadinya suatu fenomena sosial. Perubahan muncul ketika sistem sosial berada pada kondisi latensi, mendorong anggota masyarakat mencari bentuk kehidupan yang dianggap lebih sejahtera. Pada tahap tersebut, adanya reaksi serta kontrol budaya dan nilai-nilai berlaku dalam kelompok masyarakat menjadi sangat penting. Kontrol budaya berfungsi menata dinamika sosial agar perubahan dapat diarahkan sebagai proses perkembangan menuju kondisi yang lebih baik. Tetapi, pada praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian, misalnya munculnya pelanggaran terhadap nilai yang berujung pada perilaku menyimpang maupun patologis. Hal tersebut merupakan implikasi yang tak terelakkan dari proses perubahan sosial, baik secara fungsional dan struktural (Fadri, 2020).

Menurut penjelasan (Maulana, 2025) Agar suatu sistem sosial dapat membentuk tatanan yang berkelanjutan atau mengalami perkembangan secara teratur, terdapat sejumlah prasyarat fungsional yang harus dipenuhi. Selain itu, Parsons menjelaskan sistem merupakan tindakan tersusun atas tiga fokus utama, yaitu aktor individu, interaksi antaraktor, serta sistem pola budaya. Menurutnya, permasalahan fungsional dasar dalam sistem hubungan sosial yang teratur menuntut adanya persyaratan tertentu agar stabilitas minimum dapat dipertahankan. *Pertama*, sistem sosial tidak boleh disusun dengan cara yang bertentangan secara radikal dengan kondisi

dasar individu, baik sebagai organisme biologis, sebagai pribadi, maupun dengan integrasi budaya yang stabil. *Kedua*, sistem sosial harus memiliki cukup banyak aktor yang termotivasi untuk bertindak sesuai dengan peran yang ditentukan, dengan memenuhi harapan serta menghindari perilaku menyimpang. *Ketiga*, sistem sosial juga tidak boleh menetapkan pola budaya yang menuntut hal-hal mustahil dari anggotanya, karena hal ini justru dapat memicu penyimpangan dan konflik sosial.

Teori fungsionalisme struktural juga dipopulerkan oleh Robert K. Merton, sebagai kajian dalam menganalisa permasalahan yang ada yakni peran ganda dalam keluarga. Robert K. Merton seorang pentolan teori ini berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta sosial, peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok dan pengendalian sosial hampir semua penganut teori ini berkecenderungan untuk imemusatkan iperhatiannya kepada fungsi dari satu fakta sosial terhadap fakta sosial lain. Hanya saja imenurut Merton pula sering terjadi percampuradukan antara motif-motif (Farida, 2023).

Adapun penjelasan menurut Robert K. Merton sebagai berikut:

1. Fakta sosial yaitu arah bertindak, berpikir yang berada di luar individu, tapi mengendalikan individu (Nursari, 2025). Fakta sosial bersifat mengikat pada masyarakat. Kemudian Émile Durkheim menjelaskan fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang berada di luar individu, namun memiliki kekuatan untuk memaksa individu tersebut dan fakta sosial dipandang sebagai “benda” (*things*) yang dapat diamati secara objektif, seperti hukum, norma, adat, moral, atau tradisi (Syukurman, 2020).

Contoh: Peraturan lalu lintas mengharuskan pengendara menggunakan helm walaupun seorang tidak mau, peraturan tersebut berlaku dan mengikat.

2. Peranan sosial yaitu seperangkat keinginan masyarakat terhadap individu sesuai dengan status dan kedudukan (Albertus, 2024). Kemudian Soerjono Soekanto perangkat hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dengan kedudukan di masyarakat dan peranan mengatur bagaimana individu seharusnya bertindak dalam kehidupan sosial dan Masyarakat (Permana, 2023).

Contoh: Seorang Dosen di Kampus berperan untuk mengajar, melakukan pengabdian dan penelitian.

3. Pola-pola institusional yaitu aturan, peraturan, nilai-nilai, norma, dan tata cara yang terorganisir dalam lembaga sosial sehingga mengarahkan perilaku anggota masyarakat. Émile Durkheim menyatakan bahwa institusi sosial sebagai fakta sosial yang mengatur kehidupan masyarakat di luar kehendak individu dan bersifat memaksa dan mengikat (Atmaja, 2022).

Contoh: Dalam lembaga pendidikan (kampus atau perguruan tinggi), terdapat pola seperti jadwal perkuliahan, tata tertib mahasiswa, sistem ujian, dan pembagian kelas pada setiap semester prodi dan prodi.

4. Proses sosial yaitu pola berhubungan yang dapat dilihat bila antara individu dan individu, dan individu dan kelompok saling bertemu serta menentukan pola hubungan sosial (Kausar, 2024). Hal meliputi asimilasi, akomodasi, kerja sama, konflik, dan persaingan (Kosim, 2006).

Contoh: Proses kerja sama antara warga atau dalam budaya sosial yaitu gotong royong membersihkan lingkungan permukiman masyarakat.

5. Organisasi kelompok yaitu sekumpulan orang yang terstruktur, memiliki tujuan bersama, dan aturan tertentu untuk mencapai tujuan bersama (Syamsuri, 2025). Talcott Parsons Organisasi kelompok merupakan bagian dari sistem sosial yang memiliki peran penting dalam menjaga integrasi masyarakat (Satriyati, 2025). Disisi lain Organisasi berfungsi untuk mencapai tujuan dengan mengatur pola interaksi antaranggota.

Contoh: Organisasi mahasiswa (BEM, Himpunan Mahasiswa), Organisasi Siswa (OSIS), dan Ormas NU dan Muhammadiyah

6. pengendalian sosial yaitu cara masyarakat mengatur perilaku anggotanya agar sesuai dengan nilai, norma, dan aturan yang berlaku. Sedangkan menurut Roucek pengendalian sosial merupakan proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bertujuan untuk mendidik, mengajak, atau memaksa anggota masyarakat agar patuh pada norma sosial (Sari, 2024).

Contoh: Sanksi tilang bagi pelanggar lalu lintas, teguran orang tua kepada anak yang melanggar aturan rumah, atau peraturan sekolah yang memberikan hukuman jika siswa bolos.

B. Peran Tokoh Adat dalam Keikutsertaan Masyarakat pada Program KB

Tokoh adat di Desa Kenyabur Baru memiliki peran dan posisi sangat penting dalam struktur sosial dan budaya masyarakat adat. Masyarakat Desa Kenyabur Baru beranggapan bahwa tokoh adat sebagai panutan, penjaga nilai serta penghubung antara masyarakat dengan pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten. Dalam konteks Program KB tokoh adat berperan sebagai mediator, penyampai nilai adat, dan penentu keputusan sosial. Seperti penjelasan secara umum adalah seseorang yang paling diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat atau masyarakat adat karena ia memiliki pengetahuan, pengalaman, dan peran dalam menjaga, melestarikan, dan menegakkan nilai-nilai, norma, hukum adat maupun tradisi yang hidup dalam komunitas (Tan, 2025).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fungsionalisme struktural untuk membedah peran tokoh adat dalam keberhasilan program KB. Merujuk pada pemikiran (Nugroho, 2021), peneliti mengklasifikasikan temuan lapangan ke dalam empat prasyarat fungsional skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency). Kerangka ini digunakan untuk melihat bagaimana bagian-bagian dalam sistem masyarakat Desa Kenyabur Baru saling berinteraksi guna menjaga stabilitas sosial, dengan rincian sebagai berikut:

1. *Adaptation* (Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perubahan)

Menurut pendapat dari (Fadri, 2020) *adaptation* secara tegas ialah sistem sosial pada keharusan terhadap penyesuaian lingkungan dan masyarakat terhadap perilaku individu yang menuntut pada suatu bentuk susunan dan penyesuaian terhadap tuntutan dan kenyataan yang sedang dihadapi. Adapun wawancara kepada Tokoh Adat, Kepala Desa, Kepala Keluarga dan Ibu rumah tangga, sebagai berikut:

No.	Informan	Jabatan/ Status	Hasil Wawancara (Dirapikan)	Inti Temuan
1	Bapak Hermanus	Tokoh Adat Dayak	Masyarakat Dayak berusaha menyesuaikan adat dengan perkembangan zaman. Dahulu terdapat pandangan bahwa banyak anak berarti banyak rezeki, namun kehidupan saat ini perlu direncanakan dengan baik. Oleh karena itu, tidak ada larangan terhadap program KB selama caranya sesuai dengan kesehatan dan tidak melanggar adat.	Adat Dayak bersifat adaptif terhadap program KB selama selaras dengan nilai kesehatan dan adat.
2	Bapak Sunarto	Tokoh Adat Jawa	Warga Jawa di daerah ini sudah terbiasa dengan program pemerintah, termasuk KB. Program tersebut tidak dianggap sebagai bentuk melawan takdir Tuhan, melainkan ikhtiar untuk menjaga kesejahteraan keluarga.	Masyarakat Jawa menerima KB sebagai usaha rasional demi keluarga sejahtera.

3	Bapak Muslih	Kepala Desa Kenyabur Baru	Pemerintah desa berupaya agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Program KB bukan untuk mengurangi keturunan, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tokoh adat sangat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan kesehatan dengan menyesuaikan pesan KB terhadap nilai adat yang masih kuat.	Dukungan pemerintah desa dan tokoh adat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap KB.
4	Bapak Triyono	Kepala Keluarga	Dahulu masyarakat menganggap KB sebagai dosa. Namun setelah mendapat penjelasan dari tokoh adat, kepala desa, dan petugas kesehatan, masyarakat menyadari bahwa program KB sangat membantu.	Edukasi dari tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan mengubah persepsi negatif terhadap KB.
5	Ibu Ani	Masyarakat	Sebelumnya menganggap KB sebagai dosa, tetapi setelah mendengar penjelasan dari suami, keluarga, tokoh adat, dan kepala desa, ia memahami bahwa program KB sangat membantu keluarga.	Dukungan keluarga dan tokoh lokal berperan penting dalam penerimaan KB.
6	Ibu Maria, A.Md.Keb.	Bidan Desa Kenyabur Baru	Pelayanan KB dilakukan dengan menyesuaikan kondisi masyarakat. Tidak ada unsur paksaan, melainkan memberikan pilihan sesuai kondisi keluarga. Yang terpenting adalah masyarakat memahami dan siap sehingga keputusan mengikuti KB lahir dari kesadaran sendiri.	Pendekatan persuasif dan partisipatif meningkatkan kesadaran masyarakat mengikuti KB.

Dari pemaparan tokoh Masyarakat dan pihak keluarga baik bapak dan ibu serta bidan desa, menunjukkan kemampuan adaptasi sosial. Nilai adat yang lampau mulai disesuaikan dengan kebutuhan moderan dan ekonomi keluarga. Adaptasi ini membuat tokoh adat menjadi jembatan antara tradisi budaya lokal dengan kebijakan pemerintah.

2. Goal Attainment (Pencapaian Tujuan)

Dalam pandangan umum sosiologi definisi tersebut adalah kemampuan suatu sistem sosial, organisasi, atau kelompok masyarakat untuk menetapkan tujuan kolektif dan menggerakkan sumber daya serta tindakan sosial guna mencapai tujuan tersebut secara efektif. Kemudian menurut pendapat (Nugroho, 2021). setiap sistem sosial atau masyarakat akan senantiasa terdapat berbagai tujuan yang hendak dicapai sistem sosial. Adapun wawancara kepada tokoh Adat, Kepala Desa, Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga sebagai berikut:

No.	Informan	Jabatan/ Status	Hasil Wawancara (Dirapikan)	Inti Temuan
1	Bapak Hermanus	Tokoh Adat Dayak	Tokoh adat berperan memberikan pemahaman bahwa KB bertujuan menciptakan keluarga yang teratur, menjamin pendidikan anak, dan menjaga kesehatan ibu.	Sosialisasi persuasif melalui pendekatan kesejahteraan keluarga.
2	Bapak Sunarto	Tokoh Adat Jawa	Tokoh adat memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan masyarakat. Saat ini masyarakat sudah terbuka dan memahami bahwa KB tidak melanggar adat maupun agama.	Legitimasi tokoh adat dalam menghapus stigma negatif terhadap KB.

3	Bapak Muslih	Kepala Desa Kenyabur Baru	Pemerintah desa merasa sangat terbantu oleh peran tokoh adat dalam memperkuat program pemerintah, sehingga eksekusi di lapangan menjadi lebih mudah.	Sinergi antara pemerintah desa dan otoritas adat.
4	Bapak Triyono	Masyarakat (Kepala Keluarga)	Sinergi antara Puskesmas, tenaga kesehatan, dan tokoh adat sangat membantu masyarakat dalam mengatur jarak kehamilan demi kesehatan keluarga.	Penerimaan positif masyarakat berkat kolaborasi nakes dan tokoh adat.
5	Ibu Ani	Masyarakat (Peserta KB)	Keputusan ikut KB didasari keinginan agar anak lebih terurus dan menghindari kelelahan fisik akibat jarak kelahiran yang terlalu dekat.	Kesadaran akan beban pengasuhan dan kualitas hidup anak.
6	Ibu Maria, A.Md.Keb	Bidan Desa Kenyabur Baru	Keberhasilan program KB merupakan hasil kerja sama tim: Desa mendukung, tokoh adat menguatkan, dan tenaga kesehatan melayani secara teknis.	Kolaborasi multisektoral sebagai kunci keberhasilan layanan kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh adat Dayak, Jawa, Kepala Desa, Kepala Rumah Tangga dan Ibu Rumah Tangga di Desa Kenyabu Baru, bahwa pencapaian tujuan Program Keluarga Bencaana (KB) sangat dipengaruhi oleh peran tokoh adat sebagai bagian dari sistem sosial desa. Dala perseptif Goal Attainment, tujuan utama program KB yaitu mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan mampu mengatur jarak kelahiran anak. Tujuan ini tidak akan tercapai hanya melalui kebijakan pemerintah tetapi perlu dukungan aktor sosial yang memiliki pengaruh dan legiimasi di masyarakat, khususnya tokoh adat.

3. *Integration*

Integration fungsi sistem sosial yang berperan menjaga keselarasan, keteraturan, dan kerja sama antarbagan dalam masyarakat agar tidak konflik dan perpecahan. Hal ini dipertegaskan dalam pendapat (Nugroho, 2021) setiap bagian dari sistem sosial terintegrasi satu sama lain serta cendeung bertahan pada equilibrium (keseimbangan). Integration bekerja dalam cara mengatur hubungan antaraktor sosial-seperti tokoh adat, pemerintah desa, tenaga kesehatan dan masyarakat melalui norma, nilai, dan aturan yang disepakati bersama. Dalam konteks program sosial seperti Keluarga Bencana (KB). Dalam konteks program sosial seperti KB, integration terlihat ketika nilai adat, kebijakan pemerintah, dan kepentingan keluarga dapat disatukan sehingga masing-masing pihak saling mendukung, bukan saling bertentangan. Dengan adanya integration, perbedaan pandangan dapat dikelola secara harmonis, kepercayaan sosial terjaga, dan program dapat dijalankan secara stabil dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat desa. Adapun hasil wawancara kepada narasumber sebagai dibawah ini.

No.	Informan	Jabatan/ Status	Hasil Wawancara (Dirapikan)	Inti Temuan
1	Bapak Hermanus	Tokoh Adat Dayak	Urusan teknis KB diserahkan sepenuhnya kepada tenaga kesehatan karena masyarakat sudah paham manfaatnya dan tidak ada penolakan.	Kepercayaan penuh tokoh adat terhadap nakes dan absennya resistensi warga.
2	Bapak Sunarto	Tokoh Adat Jawa	Program KB dipandang sebagai kebaikan bersama yang tidak melanggar aturan adat ataupun memicu perpecahan di masyarakat.	KB dinilai selaras dengan norma adat dan menjaga harmonisasi sosial.

3	Bapak Muslih	Kepala Desa Kenyabur Baru	Seluruh tahapan pelaksanaan program KB di Desa Kenyabur Baru berjalan dengan lancar tanpa kendala atau hambatan di lapangan.	Efektivitas dan kelancaran implementasi program di tingkat desa.
4	Bapak Triyono	Masyarakat (Kepala Keluarga)	Keputusan ber-KB diserahkan kepada istri dengan pemahaman dari nakes dan tokoh adat bahwa KB tidak bertentangan dengan agama maupun adat.	Dukungan suami dan hilangnya hambatan dogmatis (agama/adat).
5	Ibu Ani	Masyarakat (Peserta KB)	Adanya penjelasan dari nakes, tokoh adat, serta dukungan suami menciptakan rasa nyaman dan menghilangkan kecemburuan sosial antarwarga.	Pentingnya dukungan psikologis dari lingkungan terdekat dan tokoh masyarakat.
6	Ibu Maria, A.Md.Keb	Bidan Desa Kenyabur Baru	Koordinasi rutin dilakukan antara nakes, pemerintah desa, dan tokoh adat untuk memastikan satu suara dalam pemberian informasi kepada warga.	Konsistensi informasi (satu pintu) mencegah kebingungan di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa peran tokoh adat sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial dalam pelaksanaan program KB di Desa Kenyabur Baru. Tokoh adat berfungsi sebagai penengah dan penyatu antar pemerintah desa, tenaga kesehatan dan masyarakat. Melalui pendekatan adat dan komunikasi yang santun, tokoh adat mampu mengurangi konflik perbedaan pendapat dan menumbuhkan sikap saling menghargai antarwarga. Dengan demikian program KB dapat dijalankan tanpa mengganggu kerukunan sosial, sehingga kehidupan masyarakat desa tetap stabil dan harmonis.

4. Latency

Latency adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan pemeliharaan, perwarisan, dan pembaruan nilai, norma, motivasi serta pola budaya agar sistem sosial tetap stabil dan dapat berlangsung dalam jangka panjang. Kemudian ditegaskan menurut pendapat (Nugroho, 2021) sistem sosial senantiasa berusaha mempertahankan bentuk-bentuk interaksi yang relatif tetap atau statis, sehingga setiap perilaku yang menyimpang. Dari deskripsi umum tentang latency maka hasil wawancara sebagai berikut:

No.	Informan	Jabatan/ Status	Hasil Wawancara (Dirapikan)	Inti Temuan
1	Bapak Hermanus	Tokoh Adat Dayak	Dalam adat Dayak, diajarkan prinsip hidup seimbang. Memiliki banyak anak namun tidak terurus dianggap melanggar nilai tanggung jawab adat.	KB selaras dengan nilai tanggung jawab dan keseimbangan hidup adat Dayak.
2	Bapak Sunarto	Tokoh Adat Jawa	Berdasarkan budaya Jawa, hidup harus dijalani dengan tertib. KB dipandang sebagai sarana untuk mengatur ketenteraman dalam keluarga.	KB merupakan instrumen untuk mencapai filosofi hidup tertib dan tentram.
3	Bapak Muslih	Kepala Desa Kenyabur Baru	Peran pemerintah desa dalam hal ini berfokus sebagai fasilitator untuk mendukung jalannya program bagi masyarakat.	Pemerintah desa berperan sebagai penyedia sarana dan prasarana (fasilitator).

4	Bapak Triyono	Masyarakat (Kepala Keluarga)	Masyarakat tidak merasa ragu untuk ber-KB karena tokoh adat memberikan dukungan dan tidak mempermasalahkannya.	Dukungan tokoh adat menghilangkan keraguan masyarakat untuk berpartisipasi.
5	Ibu Ani	Masyarakat (Peserta KB)	Keyakinan masyarakat untuk ikut program KB semakin kuat karena tidak adanya larangan dari sisi aturan adat.	Legalitas adat memberikan kepastian dan keyakinan bagi kaum perempuan.
6	Ibu Maria, A.Md.Keb	Bidan Desa Kenyabur Baru	Masyarakat mengikuti KB bukan karena paksaan, melainkan karena sudah memahami KB sebagai bagian dari nilai keluarga dan pola hidup yang baik.	Internalisasi program KB menjadi bagian dari gaya hidup dan kesadaran mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa tokoh adat memiliki peran kuat dalam mempengaruhi keputusan kesehatan Masyarakat terkait keikutsertaan dalam Program Keluarga Bencana (KB) namun disisi lain keputusan kesehatan dikembalikan ke Masyarakat yang mendapatkan dampak dari keputusan tersebut. Dalam persepektif sosiologi struktural dengan pendekatan latency, peran tokoh adat terlihat dalam upaya memelihara nilai, norma, dan motivasi Masyarakat sehingga program KB dapat diterima dan dijalankan secara stabil, dan berkelanjutan tanpa menimbulkan konflik sosial.

Berdasarkan analisis menggunakan teori Fungsionalisme Struktural, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kenyabur Baru merupakan hasil dari kerja sistemik yang mencapai kondisi keseimbangan (equilibrium). Tokoh adat, baik dari etnis Dayak maupun Jawa, menjalankan fungsi Integrasi yang krusial dengan menyelaraskan nilai-nilai tradisional dan kebijakan pemerintah. Mereka tidak memandang KB sebagai intervensi asing yang mengganggu, melainkan sebagai alat untuk mencapai filosofi hidup seimbang dan tertib. Sinergi antara otoritas adat, pemerintah desa, dan tenaga kesehatan memastikan bahwa seluruh bagian sistem sosial saling mendukung, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pesan yang dapat membingungkan masyarakat.

Dalam kerangka skema AGIL Parsons, aspek Adaptation terlihat jelas saat masyarakat mereformasi perilaku reproduksi mereka guna menyesuaikan diri dengan tuntutan ekonomi dan pendidikan masa kini. Tokoh adat memfasilitasi proses ini melalui fungsi Latency (Pattern Maintenance), yakni memberikan legitimasi moral bahwa ber-KB selaras dengan tanggung jawab adat untuk mengasuh anak dengan baik. Dengan demikian, KB bertransformasi menjadi sebuah Fakta Sosial yang bersifat mengikat namun diterima secara sukarela. Hal ini membuktikan bahwa sistem sosial di desa tersebut memiliki mekanisme pertahanan yang kuat untuk mengakomodasi perubahan sosial tanpa menciptakan disintegrasi atau konflik internal.

Ditinjau dari perspektif Robert K. Merton, terjadi pembagian Peranan Sosial yang sangat terstruktur dan fungsional. Tenaga kesehatan berperan dalam dimensi teknis-medis, sementara tokoh adat berperan dalam dimensi sosiokultural untuk menghilangkan hambatan dogmatis. Dukungan suami (seperti yang ditunjukkan Bapak Triyono) memperkuat struktur mikro keluarga, sehingga keputusan kesehatan tidak lagi menjadi beban individu perempuan saja, melainkan menjadi tujuan kolektif. Proses sosial yang didominasi oleh kerja sama dan akomodasi ini menciptakan lingkungan yang stabil, di mana partisipasi dalam program KB dianggap sebagai bagian dari gaya hidup yang bertanggung jawab demi keberlangsungan sistem sosial desa yang lebih sejahtera.

C. Kerja Sama antara Tokoh Adat, Tenaga Kesehatan, dan Pemerintah Desa

Kerja sama antara tokoh adat, tenaga kesehatan (nakes), dan pemerintah desa di Desa Kenyabur Baru membentuk sebuah sistem sosial yang solid dan beroperasi dalam kondisi keseimbangan (*equilibrium*). Dalam kerangka sosiologi, ketiga aktor ini menjalankan peran yang saling bergantung guna memastikan stabilitas sistem di tingkat lokal. Pemerintah desa berfungsi sebagai penyedia legitimasi administratif dan fasilitas, tenaga kesehatan sebagai pemegang otoritas teknis-medis, sementara tokoh adat berperan sebagai pemegang otoritas moral dan budaya. Sinergi ini memastikan bahwa program Keluarga Berencana (KB) tidak dipandang sebagai paksaan dari luar, melainkan sebagai kebutuhan kolektif yang disepakati bersama.

Tokoh adat memegang peran krusial dalam fungsi Integrasi dan *Latency* (pemeliharaan pola) dengan menjembatani kesenjangan komunikasi antara nakes dan masyarakat. Sebagai aktor yang memiliki kedekatan emosional dan kultural dengan warga, tokoh adat mampu menerjemahkan bahasa medis yang formal ke dalam bahasa budaya yang mudah diterima. Ketika Bapak Hermanus (Tokoh Adat Dayak) atau Bapak Sunarto (Tokoh Adat Jawa) menyatakan bahwa KB selaras dengan tanggung jawab dan ketertiban hidup, hambatan psikologis dan dogmatis di tingkat akar rumput runtuh. Hal ini memberikan rasa aman bagi masyarakat seperti Bapak Triyono dan Ibu Ani untuk berpartisipasi tanpa rasa takut melanggar norma adat.

Dari sisi *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), pemerintah desa di bawah kepemimpinan Bapak Muslih berperan sebagai fasilitator yang mengorganisir sumber daya. Pemerintah desa menyediakan panggung dan dukungan politik bagi nakes agar layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan warga. Keberadaan pemerintah desa memberikan kepastian hukum bahwa program KB adalah bagian dari rencana pembangunan desa yang sah. Dengan adanya struktur formal yang mendukung, tenaga kesehatan dapat lebih fokus pada fungsi pelayanan tanpa harus menghadapi resistensi sosial yang berarti, karena "jalan" komunikasi telah dibuka oleh kebijakan desa yang pro-rakyat.

Tenaga kesehatan, dalam hal ini Bidan Maria, berperan dalam fungsi Adaptasi dengan menyediakan solusi medis yang memungkinkan masyarakat menyesuaikan diri terhadap perubahan tuntutan zaman. Nakes bertugas memastikan bahwa pemahaman yang diberikan oleh tokoh adat didukung oleh fakta medis yang akurat dan layanan yang berkualitas. Koordinasi satu pintu yang dilakukan oleh bidan bersama tokoh masyarakat mencegah terjadinya asimetri informasi atau "simpulan simpang" yang dapat membingungkan warga. Konsistensi pesan yang disampaikan oleh ketiga pihak ini menjadi kunci utama yang menjaga sistem tetap harmonis dan terhindar dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) terhadap norma kesehatan.

Secara keseluruhan, kolaborasi tripartit ini membuktikan bahwa keberhasilan sebuah program pembangunan sangat bergantung pada pemenuhan prasyarat fungsional dalam masyarakat. Ketika struktur formal (Pemerintah dan Nakes) mampu berintegrasi dengan struktur informal (Tokoh Adat), maka program KB bertransformasi menjadi sebuah Fakta Sosial yang positif. Sinergi ini menciptakan tatanan sosial yang berkelanjutan, di mana perubahan sosial menuju keluarga sejahtera dilakukan secara sadar dan sukarela melalui jalur budaya, bukan melalui paksaan struktural. Hal ini menjadikan Desa Kenyabur Baru sebagai model ideal di mana sistem sosial bekerja secara sinkron demi mencapai tujuan kesejahteraan bersama.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kenyabur Baru merupakan hasil dari pemenuhan prasyarat fungsional melalui sinergi tripartit antara tokoh adat, pemerintah desa, dan tenaga kesehatan. Temuan menunjukkan bahwa tokoh adat memegang peran sentral dalam fungsi Integrasi dan *Latency*,

di mana mereka mampu mentransformasi program pemerintah menjadi nilai kultural yang selaras dengan prinsip tanggung jawab adat Dayak dan ketertiban hidup budaya Jawa. Sinergi ini menciptakan kondisi keseimbangan (*equilibrium*) sosial, di mana masyarakat menerima KB bukan sebagai paksaan struktural, melainkan sebagai keputusan sadar untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Konsistensi informasi dan dukungan moral dari tokoh masyarakat terbukti menjadi faktor kunci yang menghilangkan hambatan dogmatis serta memberikan legitimasi kultural terhadap layanan kesehatan modern.

Untuk penelitian mendatang, disarankan agar peneliti selanjutnya memperluas cakupan kajian dengan mengeksplorasi tantangan atau hambatan fungsional yang mungkin muncul pada generasi muda di wilayah adat, guna melihat apakah terdapat pergeseran otoritas nilai antara tokoh adat dan media informasi digital. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan sosiologi konflik atau fenomenologi untuk menggali perspektif kelompok masyarakat yang mungkin masih memiliki resistensi tersembunyi, sehingga didapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika struktur sosial dalam keputusan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sintang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Fatah Nur, P. N. (2020). Penguatan Sistem Sosial Dalam Mengatasi Kerentanan Masyarakat Industri. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(1), 86-96. doi:<https://doi.org/10.17977/um021v5i1p86-96>
- Ahmadin, d. (2025). *SOSIOLOGI MASYARAKAT PESISIR*. Bandung: Penerbit Widina.
- Alan, B. S. (2018). HUBUNGAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA DENGAN TINGKAT RELIGIUSITAS SISWA SMA NEGERI 1 TANGEN (PERSPEKTIF TEORI SISTEM SOSIAL TALCOTT PARSONS). *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 67-84. doi: <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-04>
- Albertus, F. &. (2024). *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Amelia Nur, S. H. (2025). JIslam, Budaya, dan Komunikasi Publik: Sinergi Pemimpin Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Ilmiah religiosity entity humanity (JIREH)*, 7(1), 116-126. doi:DOI: 10.37364/jireh.v7i1.390
- Aprilia, S. &. (2022). IMPLEMENTASI FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOTT PARSONS DALAM UPAYA MELESTARIKAN TRADISI ISLAM MELAYU NGANGGUNG DULANG DI BANGKA BELITUNG. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam*, 01(01), 18-37. doi:<https://doi.org/10.32923/dla.v1i01.2328>
- Arbi Fachriaan Alfiannur, d. (2023). PERAN AGAMA DALAM MEMBENTUK PERUBAHAN STRUKTUR SOSIAL : TINJAUAN SOSIOLOGIS. *Religion Jurnal agama, sosial dan budaya*, 2(4), 1153-1170. doi:<https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.544>
- Aria, Z. (2023). *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Depok : PT. RajaGrafindo Persada.
- Atmaja, K. (2022). *Paradigma Sosiologi Perspektif Kesatuan Ilmu*. Semarang: Penerbit Lawwana.
- Bahri, S. (2016). PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONALISME TENTANG KETAHANAN SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(1). <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.221>
- Dewi, N. E. (2024). *REPRESENTASI ARSITEKTUR RUMAH TINGGAL ORANG BALI Desa Adat Sading*. Bali: CV. Intelektual Manifes Media.

- Fadri, Z. (2020). Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online dalam Pandangan Talcott Parsons. *RESIPROKAL*, 2(2), 213-223. doi:<https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i2.40>
- Farida, F. N. (2023). Konflik Peran Ganda Dan Dukungan Sosial Pasangan Bagi Pekerja Dalam Prespektif Teori Robert K. Merton. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 322-325. doi: <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4489>
- Faulks, K. d. (2021). *Sosiologi Politik : Pengertian, Agrumen, Struktur dan Pendekatan*. BANDUNG: Nusamedia.
- Harisan, F. B. (2022). *Sosiologi kebudayaan dari nilai budaya hingga praktik sosial*. Kabupaten Sleman: Bintang Semesta Media.
- Herman, d. (2025). *ILMU SOSIAL DALAM KEHIDUPAN MODERN*. bekasi: CV Rey Media Grafika.
- Hilal, A., Sapnita, Amaliah, L., Adiaksa, B. W., Yermi, & Mustarin, Y. (2026). Peran Kearifan Lokal dalam Praktik Pencegahan Penyakit Menular di Komunitas Adat. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 3037–3045. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7238>
- Hilmi, A. M. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Gorontalo: Smart Global Nusantara.
- Kausar, d. (2024). *Sosiologi Agribisnis*. Kota Padang, Sumatera Barat: Azzia Karya Bersama.
- Komariah. (2013). *Hukum Perdata* . Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kosim, d. (2006). *IPS Terpadu (Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah)*. Bandung: PT Grafindo Media Pratama.
- Kuntjoro-Jakti, D. (2017). *Dari Indonesia Memandang Dunia Sebuah Perspektif Multidisiplin*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lae, T. (2024). *Lembaga Adat Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Sebuah Konsep Menuju Ius Constituendum*. Yogyakarta.: Penerbit K-Media.
- Mansur, M. T. (2018). *Hukum Adat : Perkembangan dan Pembaruannya*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Marsh, D. &. (2019). *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Yogyakarta : Nusamedia.
- Marwono, M., Pannyiwi, R., Harlina, H., Pramono, E., & Susanti, S. (2025). Analisis Peran Tokoh Adat dalam Promosi Kesehatan Masyarakat di Daerah Terpencil. *Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 3(3), 1153–1162. <https://doi.org/10.59585/bajik.v3i3.788>
- Maulana, I. d. (2025). Fungsional Struktural Parson dalam Perubahan Sosial Desa Ponggok Telaah Linimasa 2009. : *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 869-885. doi:<https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.6051>
- Nasrudin & Nursari, N. (2025). *BUKU PENGANTAR SOSIOLOGI (Teori, Realitas, dan Transformasi Sosial di Abad 21)*. Jawa Barat: Penerbit Widina.
- Nugroho, A. C. (2021). TEORI UTAMA SOSIOLOGI KOMUNIKASI (FUNGSIONALISME STRUKTURAL, TEORI KONFLIK, INTERAKSI SIMBOLIK). *MAJALAH ILMIAH SEMI POPULER KOMUNIKASI MASSA* , 2(2), 185-194.
- Nursari, N. &. (2025). *BUKU PENGANTAR SOSIOLOGI (Teori, Realitas, dan Transformasi Sosial di Abad 21)*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Panggabean, Y. V. (2021). *Sosiologi : Untuk Mahasiswa*. Cirebon: Yoseph Vincent Panggabean.
- Permana, I. (2023). *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Putra Janare Bela, R. A. (2025). Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Menekan Angka Kelahiran Pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. *The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(2), 995-1002. doi:<https://doi.org/10.61579/future.v3i2.518>

- Radjab, M. (2025). *Dinamika Sosial: Transformasi Nelayan Tangkap Menuju Petani Rumput Laut*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rafarza, S. M. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Program KB: Studi Kasus di Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 1112-1122. doi:<https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.486>
- Reffiane, F. (2022). *Wirausaha Para Cendekia Muda*. Jawa Tengah : Penerbit NEM.
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*. Kota Depok, Jawa Barat : Pt Rajagrafindo Persada.
- Rumangun, E. P. (2024). *Hukum Adat Perlindungan Anak*. Makasar: TOHAR MEDIA.
- Sahrozi, S. &. (2022). STRATEGI PELAKSANAAN PENYULUH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (P3AKB) DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM KB DI DESA SUMBER REJO KECAMATAN BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT. *Repository UIN Raden Intan Lampung* , 1-85. From <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/21017>
- Saimima, M. J. (2023). *SASI SEBAGAI BUDAYA KONSERVASI*. Kabupaten Bandung, Jawa Barat: Penerbit Widina.
- Sari, L. d. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Satriyati, E. (2025). *Sistem Sosio-Kultural Alokasi Waktu Anak dalam Keluarga Jawa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Setini, M. d. (2024). *Harmoni Desa Wisata: Integrasi Pariwisata Wellness Climate Friendly, Inovasi Hijau, Dan Kesehatan Digital Untuk Ekonomi Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sigai, L. R. (2018). Tradisi Ngokoi Okan Perentehu Dayak Lawangan Pendekatan Fungsional Struktural Talcott Parson. *Jurnal Penerangan Agama Hindu* , 16(1), 1-16. doi: <https://doi.org/10.33363/dd.v16i1.136>
- Soeriadiredja, P. (2023). *Database masyarakat hukum adat ekoregion Bali-Nusa Tenggara*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, Republik Indonesia.
- Sopiah, Y. (2025). INTEGRASI TEORI STRUKTURAL FUNGSIONALISME DENGAN ANALISIS GENDER DALAM KONTEKS SOSIAL KONTEMPORER. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(1), 151–160. <https://doi.org/10.9963/6gxzjs19>
- Stamadova, H. (2016). PERANAN TOKOH ADAT DALAM MEMPERTAHANKAN ADAT TUNGGU TUBANG PADA MASYARAKAT SEMENDO. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 4(5), -. From <https://jips.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/11391>
- Suriadi. (2025). *MERAJUT KEBHINEKAAN: MODERASI BERAGAMA BERBASIS LEMBAGA ADAT*. Malang: UMMPress.
- Suryanti, N. M. (2025). *BAHAN AJAR TELAAH KURIKULUM SOSIOLOGI*. Bandung: Penerbit Widina.
- Syamsuri, A. R. (2025). *Pengantar Bisnis: Paradigma Manajemen di Era Modern*. Medan, Indonesia.: Merdeka Kreasi Group.
- Syukurman. (2020). *Sosiologi Pendidikan Memahami Pendidikan dari Aspek Multikulturalisme*. Jakarta: Kencana.
- Tan, W. (2025). *Mengatasi Perkawinan Anak: Menyelaraskan Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Lamongan: Detak Pustaka.
- Trijono, L. d. (2025). *Sosiologi Politik Perspektif dan Pendekatan Kontemporer*. Yogyakarta : UGM PRESS.
- Tui Prihatini Fenti, A. Z. (2024). EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KB DI KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo Utara). *Jurnal*

- Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(2), 862-881. doi: <https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i2.173>
- Utari, D. Y. (2021). *Hukum Adat*. Bengkalis, Riau: CV. DOTPLUS Publisher.
- Wahyuni. (2018). *Agama & pembentukan struktur sosial*. Jakarta: Kencana.
- Widowati Nina, S. A. (2024). EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENINGKATKAN KEPEDULIAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ALAT KONTRASEPSI DI KABUPATEN REMBANG. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(3), 3063-4539. doi: https://doi.org/10.14710/nova_idea.48920
- Yasin Muhammad, d. (2024). Dinamika Interaksi Sosial Siswa dalam Perspektif Sistem Sosial di Sekolah. *Jurnal ilmu pendidikan dan sosial*, 2(3), 239-252. doi: <https://doi.org/10.71382/sinova.v2i3.159>
- Yulva, P. L. (2025). *ISLAM DALAM LENSE CLIFFORD GEERTZ: Jejak Simbol, Makna, dan Budaya dalam Kajian Antropologi*. Kabupaten Banyumas: wawasan ilmu.
- Zubaidi, M. (2025). *Sosiologi dan Antropologi Pendidikan Masyarakat*. Jawa Timur: Bayfa Cendekia Indonesia.